

ABSTRAK

Tujuan utama dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa secara ilmiah mengenai ketepatan dari putusan Hakim untuk tidak memberikan hak rehabilitasi bagi terdakwa penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, namun hanya menerapkan sanksi pidana dalam putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2018/PN SBY. Padahal dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa juga mewajibkan Hakim untuk memberikan hak rehabilitasi bagi Terdakwa, pasal tersebut juga didukung oleh hasil asesmen dokter serta aturan

– aturan seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Apakah putusan Hakim sudah tepat untuk tidak memberikan hak rehabilitasi bagi terdakwa penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dan hanya menerapkan sanksi pidana dalam putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2018/PN SBY

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (*Normative legal research*) dengan metode pendekatan perundang – undangan.

Kata Kunci : *Penyalahguna, Putusan Hakim, Rehabilitasi*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Allah SWT, sebagai rasa syukur atas nikmat dan hidayahnya.

Nabi Muhammad SAW, sebagai penerang kehidupan dan suri tauladan umat.

Kedua Orang Tua, Papa Fathol Rasyid dan Mama Siti Maryam yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang, nasihat, serta doa yang tulus selama ini.

Adik saya Doni Aldila Rasyid dan Deni Febrian Serta Keluarga besar yang selalu memberikandoa dan semangat.

Sahabat dan teman-temanku yang selama ini selalu menemani dan memberikan dukungan.

ABSTRACT

The main purpose of conducting this research is to analyze scientifically the accuracy of the Judge's decision to not give rehabilitation rights for the accused of narcotics abuse for themselves, but just apply criminal sanctions in decision Number 1751/Pid.Sus/2018/PN SBY. Whereas in the article that Charged to the Defendant was also obliging to provide rehabilitation rights for the Defendant, this article was also supported by the results of a doctor's assessment and regulations such as the Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2010. Therefore, the issue raised in this research Is wheather the Judge's decision was correct not to give rehabilitation rights for the accused of narcotics abuse for himself and only to apply criminal sanctions in decision Number 1751/Pid.Sus/2018/PN SBY

The research method used is the method of normative legal research (Normative legal research) with a legislation approach method.

Keywords: *Abusers, Judge's Decision, Rehabilitation*

MEMORANDUM HUKUM

Kepada : Ketua Pengadilan Negeri Surabaya

Dari : Dani Aldila Rasyid

Perihal : Penerapan Pasal Serta Putusan Pemidanaan Dalam Perkara
Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri

Tanggal : 29 Desember 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan memorandum hukum yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 1751/Pid.Sus/2018/PN SBY ”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana pada program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura.

Penulis sadari bahwa dalam penulisan ini bukanlah hasil jerih payah sendiri akan tetapi juga berkat bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua penulis (Papa Fathol Rasyid dan Mama Siti Maryam), serta saudara penulis (Doni Aldila Rasyid dan Deni Febrian)
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H.,M.H.
3. Dosen Pembimbing skripsi Bapak Firman Arif Pribadi, S.H.,M.H. Yang telah membimbing, mengarahkan mulai dari awal penyusunan Proposal Skripsi hingga dengan skripsi ini selesai.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan ilmu kepada penulis, semoga ilmu ini bermanfaat untuk penulis.

5. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang luar biasa membantu penulis dari awal kuliah hingga saat ini.

Penulis berharap semoga memorandum ini memberikan manfaat, walaupun tidak berguna bagi nusa dan bangsa setidaknya berguna bagi yang membacanya. Jika terdapat kesalahan dalam penulisan Memorandum ini, penulis memohon masukan dan saran agar memorandum ini lebih bermanfaat.

Bangkalan, 20 Januari 2022

DANI ALDILA RASYID
NIM. 170111100301

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Posisi Kasus	1
1.2 Pertimbangan Hakim	5
1.2.1 Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1751/Pid.Sus/2018/PN SBY	5
1.3 Isu Hukum	13
BAB II DASAR HUKUM	14
2.1 Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	14
2.2 Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009	16
BAB III PEMBAHASAN	19
3.1 Posisi Kasus	19
3.2 Pertimbangan Hakim	21
3.2.1 Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1751/Pid.Sus/2018/PN SBY	21
3.3 Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Nomor 1751/Pid.Sus/2018/PN SBY	30
3.3.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika	30
3.3.2 Perbuatan Pidana	31
3.3.3 Tindak Pidana	32
3.3.4 Hukum Pidana Indonesia	33
3.3.5 Ruang Lingkup Ilmu Hukum	36
BAB IV PENUTUP	45
4.1 Kesimpulan	45
4.1 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	50